

Politik Identitas Masyarakat Jawa Pasaman Barat dalam Pilkada di Kabupaten Pasaman Barat

Akbar Riyadi Universitas Andalas, Indonesia
Zainal Arifin Universitas Andalas, Indonesia
Aidinil Zetra Universitas Andalas, Indonesia

Abstract

This study discusses about Javanese ethnicity having one of the potential votes in the elections even though as a minority group. This phenomenon occurs in West Pasaman Regency. Javanese ethnic involvement in the pilkada was based on the instruction of the community leaders to elect the Javanese candidates who had advanced in the elections. On the other hand, potential Javanese ethnic groups ask for support from the community to give voting rights. This study aims to analyze Javanese ethnic identity politics in the West Pasaman regency election. This research uses qualitative method with phenomenology type. Research informants are selected using purposive sampling technique to obtain the required data. The informants interviewed the leaders of the Javanese communities, Minang and Mandailing figures, scientists who understood the community, candidates who advanced in the elections, the success team and the chairman of the West Pasaman Regency DPRD. The results of this study found First Identity similarity was obtained through a long process of adaptation, as well as through the background of individuals/groups from transmigration, retired military officers and from Suriname. Both similarities in race, religion, national origin, or a combination of these categories created an inter-ethnic Javanese ethnicity in a community shelter. The three Javanese ethnics as having the potential for votes are based on joint solidarity to choose their own ethnicity in the elections, the aim of the struggles to place their representatives in the government and provide benefits for their existence. The fourth Political identity is carried out by Javanese as the vice regent candidate, namely the campaign by asking for support to the Javanese community and conducting political contracts.

Keywords:

Ethnic Identity Politics; Javanese Ethnicity; Local Leaders Election

PENDAHULUAN

Indonesia telah menjalankan lebih dari 10 tahun kebijakan pemerintah tentang desentralisasi melalui otonomi daerah. Salah satu efek positif desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat yaitu kebebasan dalam mengatur rumah tangga, peningkatan sektor-sektor ekonomi daerah, serta mengembangkan potensi-potensi daerah. Di sisi lain, desentralisasi berefek negatif dengan munculnya politik uang (money politic) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta bangkitnya identitas etnis di daerah (Sjaf, 2014: 1). Di arena

politik, politik identitas sering kali menjadi alat oleh elit daerah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politiknya melalui isu putra daerah (Kamaruddin, 2015: 1668), fenomena ini tentunya semakin menguatkan semangat primordialisme di tengah keberagaman masyarakat Indonesia terutama daerah multikultural (Kristianus, 2016: 88). Selain itu, kedaulatan rakyat pada pemilihan kepala daerah telah membangkitkan fakta sosiologis dengan munculnya politik identitas yang ditampilkan oleh calon kepala daerah dengan keetnisan, dan bagi pemilih menjadi pertimbangan

dalam menentukan pilihannya (Hemay, et.al, 2016: 1738). Dalam perspektif ini, kebangkitan identitas etnis di daerah-daerah Indonesia bergulir sejak penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung tahun 2004.

Politik identitas dalam konteks teori dapat dipahami sesuatu yang bersifat hidup dalam setiap etnis, keberadaan politik identitas ini bersifat tersembunyi dan kekuatan, sehingga sewaktu-waktu dapat muncul sebagai kekuatan politik yang menguasai, dalam konteks empiris politik identitas merupakan penerapan partisipasi yang diciptakan melalui budaya masyarakat, serta terbentuk dalam waktu yang panjang pada kebudayaan masyarakat dalam suatu ikatan interaksi sosial (Buchari, 2014: 19). Tercatat ada sekitar 300 etnis yang mendiami Indonesia, dengan keberagaman keberagaman etnis ini telah menjadi landasan terbentuknya politik identitas, hal ini wajar politik identitas menjadi topik perbincangan menarik di daerah-daerah Indonesia. Salah satu faktor munculnya politik identitas yakni politik identitas telah memberi ruang besar terhadap peran aktor untuk membangkitkan identitas etnis yang dominan (Kamaruddin, 2015: 1677).

Selain dominasi etnis dalam suatu daerah terhadap etnis lain sering sekali alat yang di mobilisasi oleh aktor, di sisi lain, dominasi etnis dalam suatu daerah menjadi alat dari etnis mayoritas guna memilih calon

dari kelompoknya, hal ini bertujuan untuk mendapatkan akses lebih mudah dan penyerapan aspirasi (Abdul, 2015: 623). Akan tetapi efek dominasi suatu etnis ini merembes dengan bangkitnya etnis yang terpinggirkan, melalui politik identitas mereka menciptakan gerakan-gerakan sentiment primordial yang bertujuan pengakuan atas etnis yang sejajar dengan etnis lain (Tahara, 2013: 55). Lebih jauh, politik identitas dapat timbul dalam suatu daerah akibat merendahkan dan mengenyampingkan suatu etnis dalam kurun waktu yang lama, sehingga terciptanya ikatan yang kuat secara emosional (Buchari, 2014: 199)

Dalam aspek lain, politik identitas bertujuan untuk menghegemoni etnis terhadap etnis lainnya melalui kekuasaan yang dimilikinya (Kristianus, 2016: 100), hegemoni dalam politik identitas bukan saja terhadap hegemoni suatu etnis, namun hegemoni ini juga berdampak terhadap sosial politik dalam suatu daerah, secara khusus timbulnya hegemoni ini dapat mengancam budaya etnis (Bahrul, et.al, 2017: 245). Menariknya, politik identitas bukan saja persoalan tentang hegemoni, namun dapat menciptakan relasi-relasi antar etnis dalam suatu daerah agar mampu memiliki modal sosial yaitu menduduki kekuasaan (Hapsa, et.al, 2016: 145), selain itu, politik identitas dapat menciptakan relasi sosial antara kelompok masyarakat untuk menentukan nasib secara bersama tanpa adanya

ketergantungan terhadap penguasa (Syuhudi, 2016: 64)

Dalam hal lain, politik identitas di daerah juga berpengaruh terhadap minoritas, dimana aktor minoritas tersebut dapat mempengaruhi serta memobilisasi kelompok mayoritas dengan cara menjalin hubungan terhadap kelompok lain (Zakina, 2016: 128).

Kabupaten Pasaman Barat didiami oleh tiga etnis berbeda yaitu, Minangkabau, Mandailing dan Jawa. Berdasarkan persentase Minangkabau 40%, Mandailing 40% dan Jawa 20%. Sebagai kelompok minoritas etnis Jawa mampu memenangkan pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Pasaman Barat di Pilkada tahun 2015, pada pilkada tersebut, terdapat tiga calon yang maju, pertama Hamsuardi dan Kartuni kedua Zulkenedi Said dan Risnawanto serta Syahiran dan Yulianto. Berdasarkan penyebaran etnis, calon pasangan bupati dan wakil bupati pada pilkada 2015 terdiri dari dua orang etnis Minang yaitu Zulkenedi Said dan Kartuni, dua etnis Mandailing Syahiran dan Hamsuardi serta dua dari etnis Jawa Risnawanto dan Yulianto.

Pilkada Kabupaten Pasaman Barat dimenangkan oleh pasangan calon Syahiran dan Yulianto, menariknya, etnis Jawa sebagai kelompok minoritas memiliki pengaruh untuk memenangkan calon ini, kemenangan ini dilakukan oleh etnis Jawa dari paguyuban-

paguyuban Jawa dengan memberikan hak suaranya. Padahal, dengan melihat persentase etnis di Kabupaten Pasaman Barat seharusnya etnis Minang dan Mandailing dapat dengan mudah memenangkan kontestasi pilkada, di sisi lain kekalahan calon dari etnis Jawa lainnya dikarenakan tidak meminta bantuan kepada paguyuban seperti yang dilakukan oleh etnis Jawa yang memenangi pilkada tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini membahas bagaimana politik identitas etnis Jawa dalam Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015. Seperti yang dijelaskan oleh Linda Nicholson politik identitas sebagai gerakan politik yang muncul dan berkembang dari pengalaman kelompok yang dibedakan dari kelompok atau komunitas mayoritas dalam sebuah negara. Perbedaan yang berlangsung dalam ranah kultural, bahasa, agama, ekonomi, maupun politik memunculkan kesadaran komunal untuk lebih memahami, memaknai, dan memaksimalkan potensi keberbedaan sebagai kekuatan untuk melakukan gerakan-gerakan politis. Melalui perbedaan identitas itulah mereka yang merasakan solidaritas komunal akan bisa melakukan perjuangan-perjuangan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi yang tidak memberikan keuntungan bagi eksistensi mereka. Sebagai kekuatan komunal, identitas kultural memang cukup efektif untuk mengikat dan mengintegrasikan

Tabel 1. Rekapitulasi KPU Hasil Pilkada Tahun 2005

| No | DPT | Nama pasangan calon | Perolehan suara |
|----|---------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | | Baharuddin dan Zulhelmi | 37,666 |
| 2 | 199,909 | Syahiran dan Risnawanto | 40,324 |
| 3 | | Zambri dan Suhendi Hasibuan | 35,369 |
| 4 | | Zulkenedi Said dan Ema Yohana | 25,326 |

Sumber: Data sekunder KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2005.

beragam anggota sebuah komunitas ke dalam sebuah konstruksi kelompok yang memiliki persamaan nasib dan sejarah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kaedah wawancara mendalam yang dilakukan kepada sejumlah informan yang sengaja dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Adapun informan yang diwawancarai pemimpin paguyuban-paguyuban Jawa, tokoh-tokoh Minang dan Mandailing, para ilmuwan yang mengerti tentang paguyuban, calon-calon yang maju dalam pilkada, tim sukses dan ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Data primer diolah dengan mengklasifikasi bagian-bagian wawancara yang relevan dengan masalah yang dikaji dan dianalisis dengan memahami dialektika data primer, data sekunder dan teori yang ada. Untuk mendapatkan data yang dicari, maka penelitian ini mengumpulkan data di Kabupaten Pasaman Barat sehingga tergambarkan pengaruh Paguyuban etnis Jawa tersebut.

PEMBAHASAN

Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2015

Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan pilkada sebanyak tiga kali sejak tahun 2005-2015, pada pilkada Tahun 2005 ini dimenangkan oleh pasangan calon Syahiran dan Risnawanto hal ini dapat dilihat pada tabel 1, apabila melihat peserta pilkada tahun 2005 dari segi etnis maka dapat dijabarkan yaitu Baharuddin dari etnis Minangkabau berpasangan dengan Zulhelmi dari etnis Minangkabau, Syahiran dari etnis Mandailing berpasangan dengan Risnawanto dari etnis Jawa, Zambri dari etnis Minangkabau berpasangan dengan Suhendi Hasibuan dari etnis Mandailing, kemudian Zulkenedi Said dari etnis Minangkabau dan Ema Yohana dari etnis Minangkabau, pada pilkada ini etnis Jawa hanya diwakili oleh Risnawanto.

Pilkada di Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya dilangsungkan Pada Tahun 2010, berdasarkan formasi etnis pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada ini dapat dijabarkan yaitu, Baharuddin dari etnis Minangkabau berpasangan dengan Syahrul Dt Marajo dari etnis Minangkabau,

Tabel 2. Hasil Hitung TPS KPU Kabupaten Pasaman Barat Perolehan Suara Pilbub Pasaman Barat Tahun 2010

| No | DPT | Nama pasangan calon | Perolehan suara |
|----|---------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | 238,295 | Baharuddin dan Syahrul Dt Marajo | 35,17% |
| 2 | | Risnawanto dan Nofrizal | 21,60% |
| 3 | | Syahrian dan Asgul | 27,84% |
| 4 | | Akmaluddin Batubara dan Episantoso | 15,39% |

Sumber: Data Sekunder KPU Pasaman Barat tahun 2010.

Risnawanto dari etnis Jawa berpasangan dengan Nofrizal dari etnis Minangkabau, Syahiran dari etnis Mandailing berpasangan dengan Asgul dari etnis Minangkabau, serta Akmaluddin Batubara dari etnis Mandailing dan Episantoso dari etnis Minangkabau, dalam pilkada ini dimenangkan oleh pasangan Baharuddin dan Syahrul Dt Majaro, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.

Kemudian pilkada di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan pada Tahun 2015, berdasarkan formasi etnis pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada ini dapat dijabarkan yaitu, Hamsuardi dari etnis Mandailing berpasangan dengan Kartuni dari etnis Minangkabau, Zulkenedi Said dari etnis Minangkabau berpasangan dengan Risnawanto dari etnis Jawa dan Syahiran dari etnis Mandailing berpasangan dengan Yulianto dari etnis Jawa sebagai pemenang pilkada pada Tahun 2015, hal ini dapat dilihat dari tabel 3.

Dari tiga kali penyelenggaraan pilkada Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat bahwa etnis Jawa selalu maju dalam kontestasi pilkada, berdasarkan tabel di atas bahwa etnis Jawa sebagai kelompok

minoritas di Kabupaten Pasaman Barat menduduki wakil bupati pada tahun 2005 dan 2015, pada tahun 2010 etnis Jawa maju sebagai calon bupati namun tidak memenangkan pilkada, hal ini dapat dipahami bahwa etnis Jawa memiliki pengaruh dalam pilkada sebagai calon wakil bupati, namun tidak dapat bersaing apabila maju sebagai calon bupati. Menariknya, pada tahun 2015 munculnya dua etnis Jawa dalam pilkada. Berdasarkan fenomena tersebut, bahwa etnis Jawa di kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi suara yang dapat memenangkan calon dari etnisnya sendiri meskipun sebagai kelompok minoritas.

Kesamaan Identitas

Masuknya etnis Jawa di Kabupaten Pasaman Barat umumnya tidak memiliki hubungan erat atau antara mereka di daerah ini, namun dengan ditempatkannya etnis Jawa di daerah ini menjadikan etnis Jawa memiliki latar belakang etnis yang sama yaitu sesama orang Jawa. Identitas pada hakikatnya dipahami sebagai sebagai suatu ciri-ciri atau tanda-tanda yang membedakan serta melekat pada diri seseorang secara

Tabel 3. Hasil Hitung TPS KPU Kabupaten Pasaman Barat Perolehan Suara Pilbub Pasaman Barat Tahun 2015

| No | Kecamatan | Pemilih | Hasil Perolehan Suara | | | |
|----|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | Hak pengguna pemilih | 1 Hamsuardi - Kartuni | 2 Zulkenedi Said - Risnawanto | 3 Syahiran - Yulianto |
| 1 | Gunuang Tuleh | 14.735 | 10.401 | 1.965 | 2.827 | 5.449 |
| 2 | Kinali | 37.068 | 23.870 | 5.721 | 9.911 | 7.637 |
| 3 | Koto Balingka | 17.999 | 11.747 | 2.889 | 2.995 | 5.591 |
| 4 | Lembah Melintang | 28.776 | 18.366 | 9.395 | 1.408 | 7.115 |
| 5 | Luhak Nan Duo | 24.993 | 17.247 | 2.365 | 8.953 | 5.527 |
| 6 | Pasaman | 40.985 | 26.516 | 5.196 | 10.587 | 9.767 |
| 7 | Ranah Batahan | 16.760 | 12.156 | 2.137 | 2.746 | 7.065 |
| 8 | Sasak Ranah Pasisie | 9.084 | 7.305 | 641 | 5.317 | 1.415 |
| 9 | Sungai Aua | 21.176 | 14.296 | 6.832 | 1.752 | 5.259 |
| 10 | Sungai Beremas | 14.977 | 8.126 | 2.167 | 2.196 | 3.310 |
| 11 | Talamau | 19.109 | 10.791 | 2.532 | 5.337 | 2.591 |
| | Total | 245.662 | 160.821 | 41.840 | 54.029 | 60.726 |
| | Persentase | | | 26,72% | 34,50% | 38,78% |

Sumber: Data Sekunder KPU Pasaman Barat tahun 2015.

khas, secara sederhana identitas adalah kesadaran diri seseorang atau kelompok, dalam hal ini identitas yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok menitikberatkan kepada jati diri dan tanggapan seseorang atau kelompok lainnya (Huntington dalam Buchari, 2014: 22).

Secara lebih spesifik identitas dipengaruhi oleh hubungan sosial dan sejarah, hubungan sosial ini didapat melalui permulaan hidup seseorang, sedangkan sejarah adanya kesamaan-kesamaan antar satu individu dan individu lainnya. (Erikson dalam Kristianus, 2016: 92). Hal ini berkaitan dengan proses pencarian identitas yang dilakukan oleh etnis Jawa di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam prosesnya, adaptasi di suatu daerah dilakukan oleh individu/kelompok melalui interaksi sosial dan budaya yang panjang, interaksi ini

ditimbulkan karena tidak memiliki hubungan antara individu/kelompok dari garis kekeluargaan, namun hanya sebatas latar belakang, latar belakang yang dimaksud yakni individu/kelompok dari perbedaan daerah dan di tempatkan dalam suatu wadah atau daerah melalui transmigrasi, purnawirawan ABRI dan dari Suriname (Seni Misnoto [pemimpin paguyuban] 23 Juli 2018).

Disisi lain, kesamaan identitas yang terbentuk antar etnis Jawa nasib yang sama, dimana nasib ini tertuju kepada pencarian individu/kelompok atas kehidupan yang baru, sehingga proses ini menciptakan solidaritas etnis Jawa di daerah yang mereka tempati. Efek dari kesamaan identitas ini mendapatkan pengakuan dari individu/kelompok lainya terhadap individu/kelompoknya. Sejalan seperti yang

dikatakan oleh Suparlan, identitas dipahami sebagai pengenalan atau pengakuan suatu individu atau kelompok berdasarkan keutuhan ciri-cirinya dalam interaksi sosial (Suparlan, 2004: 25)

Identitas selalu berkaitan erat dengan etnis, terutama dalam pencarian identitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Melihat keseharian etnis Jawa di Kabupaten Pasaman Barat selain memiliki kesamaan identitas, mereka juga memiliki kesamaan ras, asal usul bahasa dan budaya yang di anggap sakral. Senada dengan itu, etnis secara umum dapat dipahami kombinasi unsur budaya, adat, bahasa, asal usul, kepercayaan dari individu atau kelompok (Bart, 1998). Selanjutnya Webber menjelaskan bahwa etnis dapat dipahami sebagai kelompok yang mengedepankan kepercayaan subjektif berdasarkan keturunan dan kemiripan atas fisik mereka (Webber dalam Sjaf, 2014: 18).

Hal ini juga terlihat pada etnis Jawa di Kabupaten Pasaman Barat, pada dasarnya memiliki perbedaan mendasar yakni datang dari daerah-daerah Jawa berbeda, namun karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut tercipta kesolidaritan antar etnis Jawa di sebuah naungan paguyuban yang saling di hormati antar individu dengan sistem kebudaya'an yang sama. Berdasarkan hali ini, juga berdampak kepada setiap penyelenggaraan pilkada Kabupaten Pasaman

Barat, dimana etnis Jawa memiliki potensi suara meski kelompok minoritas namun memiliki posisi tawar tersendiri.

Jawa sebagai Salah Satu Potensi Suara

Etnis Jawa di Kabupaten Pasaman Barat adalah kelompok minoritas, akan tetapi meskipun sebagai kelompok minoritas, etnis Jawa memiliki potensi suara untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015, sehingga menciptakan posisi tawar tersendiri, hal ini dapat dilihat dengan majunya dua etnis jawa dalam kontestasi pilkada, dari hasil tersebut salah satu calon etnis Jawa duduk sebagai wakil bupati Kabupaten Pasaman Barat periode 2015-2020.

Disisi lain, munculnya etnis Jawa sebagai salah satu potensi suara dilandaskan oleh solidaritas bersama untuk memilih etnisnya sendiri dalam Pilkada Kabupaten Pasaman Barat, tujuannya yakni perjuangan-perjuangan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi yang tidak memberikan keuntungan bagi eksistensi mereka (M Toyib Hadinata [pemimpin Paguyuban] 15 Agustus 2018).

Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Linda Nicholson, Politik identitas adalah suatu gerakan politik yang datang dan tumbuh dari pengalaman kelompok serta berbeda dengan kelompok lainnya, perbedaan ini terletak pada bahasa, ekonomi, budaya

dan politik, melalui perbedaan ini terciptanya solidaritas antara mereka sehingga dapat melakukan perjuangan-perjuangan yang mereka anggap penting (Nicholson, 2008).

Kemunculan politik identitas dalam ranah lokal di Indonesia seolah tidak dapat dibantahkan pada masa sekarang, hal ini tidak terlepas dari gagasan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya di barengi peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah. Efek dari undang-undang tersebut salah satunya, kegiatan politik dalam rangka penerapan dan menjalankan otonomi daerah dan menyelenggarakan pilkada langsung. Pelaksanaan otonomi daerah memunculkan semangat politik identitas, khususnya isu putera daerah yang seringkali dimunculkan untuk mendapatkan dukungan dalam pilkada (Asrinaldi, 2018: 67). Selain itu, politik identitas dapat timbul dalam suatu daerah akibat merendahkan dan mengenyampingkan suatu etnis dalam kurun waktu yang lama, sehingga terciptanya ikatan yang kuat secara emosional (Buchari, 2014: 199).

Efek negatif dari undang-undang tersebut pada dasarnya tidak dapat di hindari, kenyataan yang terjadi di Indonesia mengenai politik identitas sangatlah kompleks, hal ini juga berefek kepada

kelompok minoritas di Kabupaten Pasaman Barat yaitu etnis Jawa dengan potensi kesolitan yang dimiliki oleh etnis Jawa di Kabupaten Pasaman Barat disalurkan dalam pilkada, tujuannya yakni eksistensi mereka sebagai kelompok minoritas, selain itu mendapatkan keuntungan-keuntungan yang berorientasi terhadap ekonomi, sosial dan menyalurkan wakil mereka di pemerintahan.

Calon Meminta Dukungan kepada Paguyuban

Politik identitas etnis sering kali menjadi basis mobilisasi atas distribusi nilai-nilai dengan dasar etnis, secara sederhana politik identitas etnis adalah tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompoknya yang digunakan untuk kepentingan sosial, ekonomi, budaya dan politik tertentu, serta memeberikan keuntungan bagi kelompoknya. Dalam prosesnya pada pilkada di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 terdapat dua etnis Jawa sebagai calon wakil kepala daerah yakni Risnawanto dan Yulianto. Meski sebagai kelompok minoritas munculnya dua individu etnis Jawa dalam kontes pilkada dapat dipahami bahwa etnis Jawa sebagai bentuk perjuangan etnis Jawa yang di Kabupaten Pasaman Barat.

Mencuatnya etnis Jawa dalam kontes pilkada tentunya dibarengi dengan politik identitas yang dimobilisasi calon dari etnis Jawa itu sendiri guna tercapainya wakil

mereka menduduki pemerintahan, hal ini berkaitan dengan proses kampanye yang dilakukan oleh etnis Jawa yakni Yulianto yang duduk sebagai wakil bupati serta mengalahkan Risnawanto yang juga dari etnis Jawa. Terpilihnya Yulianto sebagai wakil bupati di Kabupaten Pasaman Barat ini dilandasi dengan menemui paguyuban-paguyuban Jawa, serta berkampanye berbahasa Jawa dan mengadakan acara-acara kebudayaan Jawa seperti Karawitan, kuda kepang, wayang kulit dan melakukan kontrak politik terhadap etnis Jawa itu sendiri, hal ini yang tidak dilakukan oleh Risnawanto pada kampanye tersebut M Toyib Hadinata [pemimpin Paguyuban] 15 Agustus 2018).

Adanya proses kontrak politik yang dilakukan oleh Yulianto dalam kampanye ini adalah bentuk meminta dukungan terhadap etnis Jawa melalui pemimpin paguyuban-paguyuban yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, hal ini berkaitan dengan fenomena kekuasaan informal yang dimiliki seseorang di luar pemerintahan, pemimpin informal ini dapat mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintahan (Asrinaldi, 2018: 59). Dengan adanya kesulitan yang dimiliki oleh paguyuban dimanfaatkan oleh calon untuk meraup suara dalam kontestasi pilkada, disisi lain, etnis Jawa sebagai kelompok minoritas mendapatkan keuntungan birokrat dan pembangunan fisik sebagai bentuk perjuangan-perjuangan mereka dalam partisipasi politik

Manfaat bagi Etnis Jawa

Munculnya etnis Jawa sebagai kelompok minoritas dalam setiap penyelenggaraan pilkada Kabupaten Pasaman Barat adalah bentuk gerakan perjuangan politik dari individu/kelompok untuk mencapai perubahan sistem sosial, ekonomi serta memberikan keuntungan bagi eksistensi mereka. Selain bentuk perjuangan politik identitas merupakan perebutan kekuasaan politik.

Dampak dari hal ini yakni duduknya wakil mereka sebagai wakil bupati. Di sisi lain keuntungan ini juga berimbas terhadap jajaran birokrat etnis Jawa menempati posisi strategis pemerintahan dan peluang tenaga honorer di Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, hal ini tidak terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan latar belakang masuknya etnis Jawa di Kabupaten Pasaman Barat melalui transmigrasi, purnawiran ABRI dan Jawa Suriname dan ditempatkan pada daerah-daerah perkebunan, hal inilah pada umumnya etnis Jawa lebih fokus di bidang perkebunan dan pertanian.

Pembangunan fisik merupakan bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun dalam bentuk akses jalan arteri, dalam konteks penelitian ini pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah yakni pembangunan jalan di daerah etnis Jawa, hal ini dilakukan oleh pemerintah karena pada masa kampanye

pilkada kabupaten Pasaman Barat tahun 2015, Yulianto sebagai wakil bupati Kabupaten Pasaman Barat periode 2015-2020 melakukan kontrak politik dengan etnis Jawa terutama kepada paguyuban-paguyuban untuk membangun akses jalan. Kebutuhan etnis Jawa terhadap akses Jalan di Kampung-kampung Jawa yakni berkaitan dengan roda perekonomian mereka, dimana dalam keseharian roda perekonomian dari etnis Jawa umumnya perkebunan sawit, dengan akses jalan yang memadai ini hasil dari perkebunan mereka dapat lebih cepat disalurkan.

KESIMPULAN

Politik identitas etnis Jawa dalam Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 dipengaruhi oleh keterlibatan paguyuban etnis Jawa dalam pilkada. Calon meminta dukungan secara langsung kepada paguyuban untuk dapat memberikan hak suara pada pilkada. Keterkaitan paguyuban dengan calon memiliki hubungan kesamaan identitas etnis. Kesamaan identitas didapat melalui proses adaptasi di suatu daerah dari individu/kelompok melalui intraksi sosial dan budaya yang panjang interaksi ini ditimbulkan karena tidak memiliki hubungan antara individu/kelompok dari garis kekeluargaan, namun hanya sebatas latar belakang, latar belakang yang dimaksud yakni individu/kelompok dari perbedaan daerah dan di tempatkan dalam suatu wadah atau

daerah melalui transmigrasi, purnawirawan ABRI dan dari Suriname.

Disisi lain kesamaan identitas yang terbentuk antar etnis Jawa nasib yang sama, dimana nasib ini tertuju kepada pencarian individu/kelompok atas kehidupan yang baru, sehingga proses ini menciptakan solidaritas etnis Jawa di daerah yang mereka tempati. Efek dari kesamaan identitas ini mendapatkan pengakuan dari individu/kelompok lainnya terhadap individu/kelompoknya.

Etnis Jawa di Kabupaten Pasaman Barat pada dasarnya memiliki perbedaan mendasar yakni datang dari daerah-daerah Jawa berbeda, namun karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut tercipta kesolidaritan antar etnis Jawa di sebuah naungan paguyuban yang saling di hormati antar individu dengan sistim kebudaya'an yang sama. Etnis Jawa sebagai kelompok minoritas di Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi suara dilandaskan oleh solidaritas bersama untuk memilih etnisnya sendiri dalam Pilkada Kabupaten Pasaman Barat, tujuannya yakni perjuangan-perjuangan untuk menempatkan wakil mereka di pemerintahan serta memberikan keuntungan bagi eksistensi mereka.

Politik identitas yang dilakukan oleh etnis Jawa sebagai calon wakil bupati yaitu kampanye dengan menggunakan bahasa Jawa, mengadakan acara-acara kebudayaan

Jawa seperti Karawitan, kuda kepeng, wayang kulit dan melakukan kontrak politik terhadap etnisnya. Keuntungan yang didapat oleh etnis Jawa yaitu adanya kontrak politik anantara paguyuban dan wakil mereka di pemerintahan untuk membangun akses jalan di kampung-kampung Jawa di kabupaten Pasaman Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrinaldi, & Azwar (2018). Dimensi Kekuasaan Penghulu Adat Melayu Riau Dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Juni 2018, Vol. 20 (1): 57-69.
- Barth, Frederich. (1988). *Kelompok etnik dan batasannya*. Jakarta: UI press.
- Hapsa, et.al. (2016). Relasi Kuasa Identitas Etnis Dilembaga Legislatif Periode 2014-2019 (Studi Kasus Anggota Dprd Etnis Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau). Yogyakarta: Hasil penelitian Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 3 No. 1. 125-145.
- Hemay, Idris & Aris Munandar. (2016). Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. *Jurnal Politik*. Vol. 12 No. 01. 1737-1746.
- Irfan, M Syuhudi. (2016). Geliat Politik Identitas di Kota Manado. Hasil penelitian Balai Litbang Agama Makassar. 57-64.
- Kahar, Abdul. (2014). *Dinamika Etnis Dalam Proses Politik Lokal Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010)*. Yogyakarta: jurnal Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 2 No. 3. 615-623.
- Kristianus. (2016). Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. *Kalimantan Barat. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. 1(1). 87-101.
- Salim, Kamaruddin. (2015). Politik Identitas di Maluku Utara. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*. Vol. 11 No. 2. 1667-1676.
- Nicholson, Linda. (2008). *Identity Before Identity Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tahara, Tasrifin. (2013). Kebangkitan Identitas Orang Bajo di Kepulauan Wakatobi. *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 34 No. 1. 41-55.
- Ulum, Bachrul, et.al. (2017). Hegemoni Sosial dan Politik Identitas putra daerah Jambi. *jurnal hukum dan perundangan islam*. Vol.7. No .1. 224-246.
- Sjaf, Sofyan. (2014). Politik Etnik Dinamika Politik lokal di Kendari. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Suparlan, Parsudi. (2004). Hubungan Antar Sukubangsa. Jakarta: penerbit KIK Press.
- Sri, Buchari Astuti. (2014). Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zakina. (2016). Politik Etnisitas dan Compliance Gaining Kandidat Minoritas Dalam pilkada kalimantan barat. Jurnal Komunikasi Vol. 01 No. 2 122-129.